

PERS DAN MEDIA MASA DALAM PERCATURAN PERADABAN DUNIA

Bila kita menengok sejarah media masa pada zaman dahulu, tentu sangat berbeda dengan media masa sekarang ini. Belum pernah ada sarana yang secepat sekarang ini dalam mempublikasikan pemikiran, opini dan berita. Revolusi industri telekomunikasi dengan satelit telekomunikasi dan komputer hardware dan software telah mendorong penemuan-penemuan baru di bidang ini. Berbagai mikrochip dikembangkan untuk mendukung penemuan sarana-sarana baru komunikasi berikutnya. Dengan alat-alat dan sarana tersebut audio, video dan data dapat di transfer dengan cepat, baik melalui media elektronik maupun internet seperti tele conference, transaksi perbankan, kerjasama antara berbagai kantor berita dan berbagai stasiun pemberitaan yang melibatkan audio, video dan data untuk transfer bolak-balik secara cepat, sehingga mengubah ruang waktu dunia menjadi sebuah majelis tatap muka. Serangan terhadap Amerika, Pentagon dan WTC pada 11 September telah dengan cepat diketahui sampai di seluruh pelosok negeri diseluruh dunia, hanya dengan alat sederhana televisi, karena ada siaran langsung CNN misalnya. Serangan Amerika ke Afganistan dan Irak untuk menduduki, menjajah dan mendirikan pemerintahan boneka telah sampai dengan cepat ke seluruh penduduk dunia dan segera mendapatkan reaksi, sehingga menimbulkan gelombang protes di berbagai negara. Pertunjukan mesin perang dimulai dan kecanggihan sarana komunikasi dipertontonkan, sekaligus juga mempertontonkan kemunduran dan kejahiliyahan peradaban manusia modern Kapitalisme. Oleh karena itu agak sulit membandingkan pemaparan media masa zaman dahulu dengan media masa sekarang ini, dari segi sarana, prasarana dan alat-alat pendukungnya. Tetapi tidak sulit untuk mengungkapkan pemikiran, opini dan dakwah yang dilakukan oleh media masa baik zaman dahulu maupun sekarang. Dakwah dan Negara biasanya selalu memiliki media masa yang mempunyai pelayanan kuat terhadap mabda', akidah dan hukum serta memiliki tujuan-tujuan pokok.

Salah satu perbedaan utama media masa yang baik dan benar dengan lainnya adalah, bahwa media masa yang baik dan benar melayani terhadap mabda', bukan melayani penguasa / pejabat Negara, antek-antek pejabat, system mereka, keluarga mereka dst sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ketika media masa melayani mabda'(idiologi), artinya adalah bahwa media masa menjadi pengemban dakwah dan penyebar peradaban dan mengelola perasaan masyarakat agar tetap puas dan tenang dengan mabda' di dalam negeri, dan menebar opini ke Negara asing untuk memaksa mereka agar merespon pemikiran dan peradaban yang benar, Negara yang mengemban akidah dan peradaban yang benar dan system yang baik, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan dakwah dan jihad serta perbekalan tentara, dengan harta dan nyawa dapat dikerahkan secara maksimal, apabila fungsi pelayanan media masa kepada mabda', akidah dan hukum yang benar bisa berperan dengan baik.

Kebenaran universal, keadilan universal, kemanusiaan dan keridhoan Alloh swt harus menjadi panglima bagi pers dan media masa dalam seluruh aktifitasnya, baik yang secara langsung berkaitan dengan pers dan media masa maupun lainnya. Tidak boleh lagi ada semboyan Jahiliyah modern "*Right or Wrong is my Country*". Mengapa harus demikian ?

Ada beberapa pokok pikiran menyangkut hal ini. Pertama: Untuk merespon secara memadai bila terjadi kedzaliman terhadap pers dan media masa. Berbagai kasus pembunuhan wartawan, seperti kasus pembunuhan wartawan Mohamad Syafrudin (Udin) Jojakarta, pembunuhan wartawan Eliyuddin Medan, penyanderaan wartawati Mutia Hafidz di Irak, pembunuhan wartawan aljazeera Thariq Ayyub di Baghdad sewaktu serangan Amerika ke Irak dst. Ataupun berupa teror terhadap insan pers, tekanan dari pihak penguasa atau dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dsb. Dan semua jenis dan macam kedzaliman kepada pers dan media masa, apaun bentuknya. Semua itu akan mendapatkan respon yang memadai jika ditangani secara universal dengan standar internasional yang universal sehingga dapat bergaung secara internasional, walaupun misalnya peristiwanya merupakan kasus lokal. Dan biasanya kasus-kasus yang direspon secara internasional, akan lebih kuat untuk mendorong terjadinya proses penyelesaian secara komprehensif dan integral, dan akan menjadikan pers dan media masa terhindar dari posisi terpojok dengan harus mengatasi persoalan secara sendirian.

Yang kedua, Untuk menempatkan posisi pers dan media masa pada posisi terbaik, yaitu kedudukan sebagai mimbar yang memerintahkan kebaikan dan kebenaran universal, serta mencegah dan menghentikan kemungkaran secara menyeluruh, baik kemungkaran secara individual, terorganisir maupun kemungkaran yang bersifat sistemik dan dimotori oleh negara Imperialis atau pemerintah yang rusak. Sehingga dengan menempatkan posisi tersebut sebagai persoalan kebenaran universal, keadilan universal, kemanusiaan dan keridhoan Allah swt, akan memperoleh kedudukan tertinggi dan terhormat di tengah-tengah masyarakat.

Yang ketiga, Untuk dapat menjadikan pers dan media masa hanya mengabdikan kepada Tuhan yang maha kuat Allah swt, bukan mengabdikan kepada makhluk yang sangat lemah. Hal ini penting, karena dengan pengabdian kepada Allah swt saja pers dan media masa akan mendapatkan energi yang luar biasa, tidak ada tandingannya yaitu nilai kerohanian, disamping mendapatkan nilai maknawi dan materi. Dan ini berarti cita-cita yang di emban pers dan media masa tidak akan kehabisan energi dalam menghadapi semua tantangan yang menghadang baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini jika dan hanya jika posisi pers dan media masa berada pada kebenaran universal, keadilan universal, kemanusiaan dan keridhoan Allah swt, dan meninggalkan semboyan bodoh dan semboyan koboy tidak tahu hukum dan tidak tahu kebenaran "*Right or Wrong is my Country*".

Memuji dengan pujian sebaik-baik umat adalah pujian dan penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melakukan Amar makruf dan nahi mungkar sebagai mana yang dilakukan Nabi saw, para sahabat nabi ra dan para tabiin setelahnya. Allah berfirman,

: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ." (سورة آل عمران، آية: ١١٠)

: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran, ayat: 110) Kedudukan tinggi yang ditunjukkan oleh Allah swt ini tidak akan dapat diperoleh kecuali jika pengabdian hanya

kepada Allah semata, sehingga mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan akherat, Insya Allah.

Bagaimana Seharusnya Pers dan Media Masa di jalankan

Oleh karena media masa harus melayani kebenaran, bukan kebenaran dijadikan melayani kepada media masa sebagaimana yang terjadi sekarang ini, maka setiap sumber berita berpedoman kepada hukum syar'I dalam setiap perkataan mereka dan siaran pers / statement mereka. Dengan demikian siapa saja yang memang motivasi dirinya adalah mengemban mabda', bakalan tidak akan punya ruang dan waktu yang cukup untuk sekedar mengisi berita sampah, hiburan dan mempermainkan rakyat. Mengapa demikian ? Hal ini dikarenakan siapa saja yang bermaksud mengemban dakwah pasti tidak akan berhenti memperhatikan dan menjawab berbagai persoalan rakyat yang terus menerus baru, dan tidak akan berhenti sampai semua opini dunia bercahaya dengan mabda' yang benar yaitu Islam, dan menghilangkan semua kegelapan peradaban kufur dan seluruh derifatnya.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (سورة الصف، آية: ٨)

:"Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci." (QS. Asshof, ayat: 8)

Dan sudah pasti media masa yang mengemban mabda' tidak akan menjatuhkan semangat rakyat dan tidak akan memata-matai rakyat, dan tidak akan mengopinikan yang bersifat syu'udz dzon kepada rakyat, karena sesungguhnya sebagian syu'udz dzon adalah dosa. Dan tidak akan mencari sumber opini dari kalangan orang fasik, kriminal, karena apabila ada berita dari kalangan orang fasik harus di lakukan tabayun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (سورة الحجرات، آية: ٦)

:"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Alhujurot, ayat: 6)

Dengan demikian media masa yang islami pasti tidak akan mendustakan orang-orang islam, dan tidak pula untuk menyudutkan mereka, apalagi misui Islam dan Umat Islam dengan pisuan politik (makian politik) extrimis, militan, fundamentalis, teroris, extrimis, fanatik dsb. Media masa yang Islami tidak bersifat munafik kepada rakyat, dan tidak mengikuti opini Negara-negara kafir, dan tidak takut cercaan orang-orang yang menentang ketika mengangkat berita kebenaran. Memahami rahasia orang (private) dan kehormatan orang, sebab kehormatan harus dijunjung tinggi dan sirry orang harus di tutupi. Berbicara dengan masyarakat sebagaimana masyarakat umumnya, tidak sebagai seorang yang seolah-olah sebagai manusia yang berkualitas lain dari masyarakat. Menghargai pandangan masyarakat dalam tingkat berfikirnya, dan tidak merendharkannya. Menghargai perasaan dan kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum yang benar. Menghentikan penganiayaan kepada

orang yang didzalimi, sehingga yang mendzalimi dapat di bawa ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi. Mengoreksi penguasa, mengkritik mereka, karena media masa adalah mimbar untuk mengingkari kemungkaran dan memerintahkan amar makruf.

Media masa yang baik dan benar selalu tegak dengan independensi, bukan media yang diarahkan atau dikuasai pihak lain. Dia bersifat terbuka standar universal dunia. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan keridhoan Allah selalu didasarkan pada akidah dan peradaban yang benar, dan dia tidak mengikuti skup tertentu atau standart yang salah. Paradikma media yang baik dan benar besifat standart kebenaran universal dunia, dan tidak menjadi aneh ketika di sebarakan dalam sekala dunia. Media masa harus berstandart kebenaran universal, dia tidak bersetandart subyektif local, kelompok, suku, bangsa dsb.tetapi dia berstandart pada kebenaran fakta dan kebenaran hadhoroh / peradaban walaupun misalnya hanya disebarakan dalam sekala lokal. Tidak berlaku semboyan "*Right or Wrong is my country*". Tetapi tetap bersetandart pada kebenaran universal dunia. Sebab kebenaran yang diridhoi Allah adalah kebenaran yang Islami dan sekaligus rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana disebutkan di dalam Alqur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. "سورة الأنبياء، آية: ١٠٧

:"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. AL-Anbiya', ayat: 107)

Media dalam masyarakat kapitalis dianggap sarana untuk menjaga / control pelaksanaan hukum, dan di pakai untuk menjamin kebebasan indifidu kapitalis dan umat kapitalis untuk menegakkan idiologi kapitalisme, bukan untuk menjamin kebebasan umat Islam dalam menegakkan Islam, bahkan biasanya para kapitalis merintangai dan memusuhi umat Islam untuk menegakkan Islam. Lihat kasus digagalkannya kemenangan FIS di Aljazair, Hamas di Palestina, Refah di Turki dst. Hal kebebasan Kapitalisme bukan saja bertentangan dengan hukum islam, melainkan juga merupakan penistaan dan penghapusan hukum Islam. Sebagai contoh saja, kebebasan tingkah laku kapitalisme yang melahirkan komunitas homosexual, lesbian, wadam dan kejahatan indifidual lainnya. Hal semacam ini merupakan serangan dan usaha melenyapkan syari'at Islam, karena hal semacam itu dalam pandangan Islam adalah tindakan dosa dan kriminal. Lebih dari itu kapitalisme adalah idiologi kufur sebagai induk semua kemungkaran, dia membebaskan kemungkaran, melindungi kemungkaran dan memusuhi orang-orang yang mencegah kemungkaran. Oleh karena itu kebebasan islami: kebebasan menegakkan Islam adalah kebebasan yang baik dan benar, bukan kebebsan menegakkan kapitalisme dan kemungkaran. Sehingga media masa harus menjamin kebebasan ditegakkannya pemikiran, pemahaman / opini dan perbuatan yang benar dan diridhoi Allah atau dengan istilah yang populer: *yang Islami*, untuk menghentikan semua kemungkaran. Mengapa harus islami ? karena Allah swt hanya rela kepada Islam, dan tidak kepada lainnya. Sebagaimana firman Nya :

”وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.” سورة المائدة: ٣

:"Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Ma'idah, ayat:3)
Dan firman Allah,

”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.” (سورة آل عمران، آية: ٨٥)

:"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran, ayat: 85) Islam memang agama, tetapi bukan agama dalam pengertian orang barat. Islam mensyariatkan kehidupan individu, keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, peradilan, kemasyarakatan, kenegaraan dan seterusnya. Islam bukan hanya syariat ritual, akhlaq / moral, melainkan mencakup syariat seluruh aspek kehidupan.

Media masa islami dalam pengertian yang sebenarnya, bukan sekedar nama, kepentingan atau dalam pandangan partial. Pandangan salah kaprah dan partial seperti menganggap media Islam adalah jika media tersebut menampilkan jadwal sholat, ada adzan, ada kuliah subuh dsb. Bukan seperti pandangan partial tersebut, tetapi Media masa Islami adalah media masa yang memang berdasarkan akidah dan hukum Islam dalam seluruh aktifitasnya. Sebagai contoh, memberikan dan memfasilitasi opini umum agar BBM dan semua barang tambang ditegakkan berdasarkan pemilikan umum, bukan milik individu atau milik negara, sebab pemilikan yang islami terhadap BBM dan semua barang tambang adalah milik umum rakyat. Penjelasannya demikian: Sebenarnya krisis harga BBM sekarang ini berskala dunia, dia melampaui batas-batas negara. Krisis BBM ini sebenarnya merupakan bentuk clash Civilization sebagai mana yang diungkap oleh Ulama' Kapitalis Somuel Hatington. Hukum Pemilikan BBM di dunia sekarang ini sebenarnya hanya tiga macam, bahkan hukum-hukum itu telah ada sebelum negeri ini didirikan. Pertama, Kapitalisme menempatkan syariat pemilikan barang tambang, termasuk BBM didalamnya sebagai milik individu. Kedua, Komunisme-Sosialisme yang di karang oleh **Karl Marx** menempatkan syariat pemilikan barang tambang termasuk BBM sebagai milik negara. Dan yang ke-3, Islam mensyariatkan hukum pemilikan bagi semua barang tambang termasuk BBM sebagai milik umum. (lihat nizam Iqtishod, hal: 177-181, tentang pemilikan umum dan pemilikan negara)

Sebenarnya jika BBM sebagai milik umum artinya adalah produksi, pengelolaan, pemanfaatan, termasuk penjualannya ada di tangan rakyat, harus diambil berdasarkan putusan suara mayoritas rakyat, tidak boleh diputusi oleh DPR dan pemerintah. Dan jika dijual semua hasil penjualannya hanya digunakan untuk biaya pengadaan dan pengelolaan fasilitas umum, tidak boleh untuk membayar gaji pegawai negara. Sebab Gaji pegawai negara diambil dari harta pajak, karena harta pajak adalah harta milik negara bukan milik umum. Masing-masing harta telah ditentukan hukum pemilikannya, dan telah ditentukan pula hukum penggunaannya.

Ketika media masa berpihak kepada opini bahwa BBM dan semua barang tambang sebagai pemilikan individu, maka berarti media tersebut adalah media masa Kapitalisme, karena telah terlibat mendakwahkan syariat Kapitalisme. Dan ketika media tersebut memperjuangkan pemilikan BBM dan semua barang tambang sebagai milik negara sebagaimana ajaran **Karl Marx**, maka dia telah menjadi media masa Sosialisme-Komunisme, karena terlibat mendakwahkan syariat Sosialisme-Komunisme. Demikian juga ketika media masa tersebut berpihak kepada pemilikan umum rakyat, berarti dia telah menjadi media masa yang islami, karena telah ikut mendakwahkan syariat Islam dalam pemilikan umum untuk BBM dan semua barang

tambang. Hal ini berarti mendorong untuk menjadikan segala keputusan menyangkut BBM dan semua barang tambang untuk diserahkan kepada mayoritas rakyat tanpa diwakili DPR maupun pemerintah. Dan pemerintah dan DPR tidak boleh mengambil keputusan untuk BBM. Dan juga sekali gus mendorong semua perundangan agar direvisi untuk disesuaikan dengan hukum pemilikan umum tersebut untuk BBM dan semua barang tambang. Demikian sekilas contoh dan penjelasan serta perbedaan media masa islami dan media masa tidak islami.

Media masa Islam tidak untuk design bisnis semata, permainan, hiburan dan untuk sekedar mengisi waktu, tetapi dia diperuntukkan menjamin amanah agar ditunaikan sebagaimana mestinya. Sebagaimana amanah yang pernah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung yang kemudian mereka menolak tidak sanggup menerimanya, kemudian manusia menerima dan mengambilnya. Yaitu mengemban risalah, dan menyampaikannya kepada semua manusia dan menegakkannya dalam rangka mengemban mabda' Islam dengan cara yang benar. Sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. "سورة الأحزاب: ٧٢

:"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab, ayat: 72)

Ajaran **Machiavelli** "Tujuan menghalalkan semua cara" tidak ada tempat dalam masyarakat Islam. Dan tidak ada cara haram yang dapat menghantarkan kepada yang mubah, apalagi menghantarkan kepada yang wajib.

الغاية لا تبرر الوسيلة

:"Tujuan tidak menghalalkan semua cara." Tetapi kebenaran harus dihantarkan dengan cara yang jelas, jujur dan benar dalam mencapai tujuan. Media tidak bergelut dan melakukan cara-cara seperti buih mengikuti tiupan angin, tetapi tetap teguh memegang dengan opini, berita dan cara yang bermanfaat bagi manusia.

Media masa Islam tidak memperlakukan rakyat sebagai musuh pemerintah, dan juga tidak memperlakukan pemerintah sebagai musuh rakyat. Media masa tidak mengeksploitasi tindakan yang tidak dilakukan pemerintah, dengan "black campaign" yang berupa penindasan dan teror yang dilakukan pemerintah kepada rakyat untuk merendahkan, dan menghina rakyat agar tunduk kepada kekuasaannya, sebagaimana biasa dilakukan pemerintahan penjajah / Imperialis. Hal ini akan menimbulkan semangat dan kesadaran umum rakyat untuk melawan pemerintah dan negara, yang berikutnya mendorong timbulnya ketidak sepakatan terhadap negara yang dapat memicu dan mengarah bubarnya suatu negara, seperti bubarnya Uni Sovyet.

Media masa Islam tidak merujuk pada sumber-sumber opini yang diwakilkan pada pihak-pihak yang tidak konsisten, tidak jujur, penuh kepentingan, dan memiliki loyalitas ganda. Oleh karena itu tidak boleh

diterima untuk dipublikasikan opini-opini yang di rilis dari mereka orang-orang fasik, dzalim dan kufur ataupun dari para kriminal.

Media masa Islam tidak bersandar pada pemikiran barat kapitalisme, dan tidak merujuk pada pers kapitalistis, wartawan dan redaktur kapitalis, dan sumber apapun yang bertentangan dengan akidah dan hukum islam, apalagi menghujat Islam dan umat Islam dengan pisuan politik (makian politik) terhadap Islam dan umat islam, seperti: *pisuan politik: fundamentalis, radikal, teroris, ekstrimis, militan, fanatik dsb*. Karena pisuan-pisuan politik itu tidak lain dan tidak bukan, kecuali sebagai pernyataan permusuhan dan pernyataan perang terhadap Islam dan umat Islam, yang sudah biasa dilakukan oleh para kaum kafir Kapitalis Amerika dan Eropa.

Dan dari semua itu kita berharap kepada Allah swt agar media masa tidak menjadi media masa penghayal, dan pendukung kekufuran, kemungkaran dan kemaksiyatan. Dan semoga media masa yang dibawah kendali orang-orang Islam dapat selalu dan terus-menerus mendengungkan kebenaran fakta dan kebenaran peradaban Islam yang universal dan rohmatan lil alamin, dan kita dijadikan sebagai sebaik-baik umat yang menyeru kepada semua manusia kepada kebenaran, keadilan, memerintahkan yang makruf dan mencegah dari segala kekufuran, kemungkaran dan kemaksiyatan dengan metode menegakkan peradilan atas seluruh manusia agar dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt dalam Alqur'an surat Alhadjj, ayat: 78,

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.

* Penulis adalah: Direktur ISTAC Jakarta. (Islamic Thought and Civilization). Penulis juga sebagai Ketua Umum FKM: Forum Komunikasi Masjid Seluruh Indonesia.

** Makalah ditulis oleh Ustadz Ahmad Muhibudin, dan disampaikan dalam acara Seminar dan pelatihan dasar jurnalistik dengan tema "Mewujudkan Pena Peduli Umat" di Gedung Auditorium Universitas Semarang(USM), yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Universitas Semarang, pada tanggal 13 September 2008. (pnt.)

PERKEMBANGAN DUNIA PERS : KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN GLOBALISASI INFORMASI(*)

Oleh: M Chaerul Lathif, S.Sos. M,Si
(Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi USM Semarang)

Sekilas Kebebasan Pers Indonesia

Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Meski kalangan pers di berbagai negara diberi kebebasan dan telah menjadi lebih profesional, di berbagai belahan dunia saat ini para wartawan tetap menghadapi intimidasi, kekerasan, pengasingan, penjara, bahkan hukuman mati atau pembunuhan.

Bagi Indonesia sendiri, pengekan pemerintah terhadap pers di mulai tahun 1846, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sejak itu pula, pendapat tentang kebebasan pers terbelah. Satu pihak menolak adanya surat izin terbit, sensor, dan pembredelan, namun di pihak lain mengatakan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan.

Pemerintah kolonial kemudian meninggalkan sejumlah aturan yang dibawa ke alam kemerdekaan. Aturan tersebut seperti Druckpers Reglement (UU Pers) yang dikeluarkan pada 1854, Haatzaai Delicten (UU Hukum Pidana Komunikasi Massa) tahun 1856 ataupun Persbreidel Ordonnatie yang dikeluarkan tahun 1931.

Meski telah dihapus dengan UU No 23/1954, pers Indonesia tidak berarti terbebas dari pemasungan. Seperti dikatakan Presiden saat itu, Soekarno, saat melantik Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan Kantor Berita Antara 15 Oktober 1952. "Saya tidak menginginkan siaran berita yang objektif, tetapi jelas memihak pada revolusi kita dan menghantam musuh-musuh revolusi." Karena itu, pers yang bermusuhan dengan revolusi harus dilenyapkan. Tidak heran, tindakan, tuduhan dan pembredelan pers terjadi berkali-kali.

Aneka ketentuan pers tidak merdeka diregulasi dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Pokok Pers No 11/1966, juncto No 4/1967, juncto No 21/1082. Isinya, pertama, UU Pokok Pers didesain dengan paradigma pemerintah yang mengontrol opini publik dan pers. Kedua, sesuai dengan paradigma itu, pemerintah memerlukan legal authority untuk bisa mencampuri dan mengintervensi penyelenggaraan pers. Maka, UU Pokok Pers memberi Menteri Penerangan wewenang menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pers dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Ketiga, agar kontrol pemerintah atas pers menjadi efektif, pemerintah memerlukan dua alat kendali. Pertama, izin pemerintah bagi penerbitan pers. Maka, penerbitan pers bisa dibredel jika tidak mendukung pemikiran penguasa. Alat kendali kedua, selain diatur KUHP, politik hukum kriminalisasi pers juga diatur dengan UU Pokok Pers. Pers dan wartawan yang melakukan pelanggaran jurnalistik bisa dipidana penjara dan atau didenda dengan

jumlah yang membangkrutkan. Dengan kendali perizinan dan kriminalisasi pers, pers dapat dijinakkan secara efektif.

Keempat, Dewan Pers menjadi mitra pemerintah bertugas (1) merepresentasi komunitas pers dan masyarakat, (2) memberi legitimasi terhadap kebijakan komunikasi dan penerangan pemerintah. Dewan Pers ditakuti dan dibenci. Ditakuti karena Ketuanya Menteri Penerangan. Dibenci karena jika pemerintah hendak membredel media, Dewan Pers lebih dulu ditugasi mengusulkannya.

Penerapan kebijakan komunikasi dan penerangan seperti dikemukakan selama kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru berdampak (1) pikiran masyarakat umum tersekat, rakyat dibina menjadi seperti beo; (2) hanya pikiran penguasa yang menjadi acuan; dan (3) pers tumpul dan gagal memberi peringatan dini atas penyalahgunaan kekuasaan.

Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers mengembangkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab secara hukum. Sejarah ketiga media tersebut mengikuti sejarah Fokus, Sinar Harapan, Prioritas, dan Monitor, yang semuanya dibredel tanpa proses pengadilan.

Kebebasan pers

Perubahan kekuasaan pada tahun 1998, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, membuat pers menemukan kemerdekaannya. Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah, mencabut pemberlakuan SIUPP. Menurut Yunus, kebebasan pers adalah satu pengejawantahan dari keikutsertaan warga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara. Ini berarti, kebebasan pers merupakan bagian dari konsep demokrasi bahkan merupakan salah satu unsur fundamental.

Sejak titik balik itulah, pers Indonesia dapat mengabarkan berita secara transparan tanpa kekhawatiran SIUPP yang akan dicabut. Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat maupun berseberangan dengan pemerintah. Begitu juga, tidak perlu ragu lagi untuk menyajikan berita atau laporan-laporan yang sebelumnya dinilai berisiko.

Dengan dihapuskannya lembaga SIUPP, beberapa media yang sempat "mati", kini pun hidup kembali, seperti Majalah Berita Mingguan Tempo dan Harian Umum Sinar Harapan. Kalaupun tidak menghidupkan yang "mati", dengan segala kemudahannya, kini mudah ditemui surat kabar, majalah, berita radio, dan televisi maupun situs berita online baru.

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menghapuskan Departemen Penerangan. Meski para wartawan masih tetap mendapat ancaman intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan, dengan dihapuskannya Deppen paling tidak pers punya hak untuk menyebarkan informasi yang bebas dari sensor melalui bentuk media apapun.

Kebebasan pers pada kenyataannya sedang di persimpangan jalan. Dunia pers mengklaim kebebasan untuk tidak dituntut oleh pengadilan kriminal: kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak mana pun.

UU Pers No 40/1999

Mengapa undang-undang tentang no.40 tahun 1999 ini dinilai akan dapat memerdekakan pers? Pertama, UU itu berparadigma publik dan pers-lah yang mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya. Kedua, sejalan dengan paradigma itu, dalam UU itu tidak ada lagi kewenangan pemerintah untuk mencampuri dan mengintervensi penyelenggaraan pers. Karena itu, peraturan pemerintah dan peraturan menteri tidak diperlukan. Pasal 15 Ayat 2 Huruf f menegaskan—atas fasilitasi Dewan Pers—regulasi penyelenggaraan pers disusun organisasi- organisasi pers (self regulating). Selain itu, penerbitan pers tidak memerlukan izin. Dengan ketentuan ini nantinya akan meniadakan ancaman pembredelan.

Keempat, penerbitan pers menganut politik hukum dekriminalisasi pers. Kesalahan jurnalistik diselesaikan berdasar mekanisme jurnalistik. Sanksi terberat bukan penjara, tetapi denda maksimum Rp 500 juta. Dalam UU ini, barang siapa yang menghambat kegiatan jurnalistik terancam pidana penjara maksimum dua tahun atau denda maksimum Rp 500 juta.

Kelima, Dewan Pers ada pada posisi independen dan diberi kewenangan melaksanakan tujuh fungsi antara lain melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan mengupayakan penyelesaian pengadilan masyarakat atas kasus-kasus pemberitaan pers.

Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers menyebutkan, "*Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum*".

Ini artinya, kemerdekaan pers dijalankan di dalam bingkai moral, etika dan hukum, sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sesuai dengan hati nurani insan pers.

Istilah "Kebebasan Pers" sebenarnya dikonsepsikan melalui suatu konklusi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU No 40/1999 beserta penjelasannya, yang pada intinya menyatakan pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dengan demikian, makna kemerdekaan pers lebih luas dari makna kebebasan pers yang dipersepsikan oleh insan pers.

Pers dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam zaman reformasi ini. Namun, pada kenyataannya harus disadari pula bahwa pers kita menjadi pers yang lebih sering beretorika (meminjam istilah Satjipto Rahardjo) sehingga terkadang menyalahgunakan kebebasan sendiri (*abuse of liberty*).

Kebablasan pers

Setelah bergulirnya UU pers beberapa tahun yang lalu, kini pers telah merasakan udara kemerdekaannya, sebuah kondisi yang sangat dirindukan sekian tahun yang lalu. Namun seiring dengan berjalannya waktu serta aroma kebebasan yang tidak terkontrol, kini pers seakan melaju dengan mulus tanpa adanya hambatan sama sekali. Hal ini berhubungan dengan baik semakin menjamurnya media-media pers baru, juga semakin beraninya

pers dalam menyajikan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang lebih identik dengan nafas "provokasi". Bahkan, pers sekarang lebih pintar membeberkan omongan-omongan, pernyataan-pernyataan belaka tanpa diskusi tentang "ketuntasan". Pers hanya mencari-cari dan memburu berita-berita konsumtif mengenai ketidakberdayaan, kebobrokan dan kesensasionalan bahkan gosip tanpa memberi jalan keluar.

Olah karenanya, pers dalam media massa tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat, tetapi lebih banyak menjadi sumber provokasi. Pers yang demikian adalah pers yang retorik, yang bisa merusak bekerjanya institusi pers sesuai dengan otentitasnya yang baku. Dalam kondisi yang demikian, pers berperan besar dalam membangun bangsa yang selalu "bertindak dengan retorika" belaka. Karena pada prinsipnya Pers sudah menjadi kekuatan yang sangat besar mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu beban yang dipikul pers adalah bertanggung jawab atas kebenaran dari beritanya dan dampak yang timbul dari pemberitaannya.

Yang terjadi sejauh ini terkadang pers gagal mengantisipasi eksekseks negatif dari kebebasan pers seperti pornografi, penyebaran berita bohong, provokatif, sampai pada *character assassination*. Tidak jarang pers sengaja menciptakan opini (*opiniated*) terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat dengan membawa kepada opini kebersalahan (*culperend*).

Bagaimanapun juga kita harus mengakui, pers Indonesia tak jarang keluar dari koridor profesionalisme dan etika jurnalistik. Kemerdekaan pers masih berjalan dalam tatanan artifisial; karena kebebasan itu banyak diterjemahkan sebagai kebebasan untuk memberitakan apa saja dengan gaya apa saja: sensasional, bombastis, provokatif, dan menyerang.

Bahkan ada anggapan bahwa pers sekarang sebagai *conflict intensifier* masalah SARA dan politik. Kita juga tidak dapat menutup mata melihat media yang kebablasan, cabul, bahkan terlampau liberal. Kita juga banyak menyaksikan sekelompok wartawan bodreks menggunakan pers untuk melakukan pemaksaan dan pemerasan terselubung. Ini semua adalah kekurangan dunia pers kita.

UU Pokok Pers No.40/1999 sebenarnya telah memberi landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia. Namun dalam praktiknya hingga kini kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap profesinya.

Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers. Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan di samping menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers, juga diakibatkan oleh masih rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya.

Dalam media politik pascareformasi, masih dapat kita ingat jelas kasus Gus Dur. Saat jadi presiden, foto rekayasa Gus Dur laksana Tom Cruise dalam film Mission Impossible II, dipampang media tanpa mengindahkan etika. Begitu juga dengan gambar Gus Dur yang bak Superman maupun Gus Dur bersama Aryanti Sitepu, yang mengaku sebagai pacar gelap orang nomor satu di Indonesia itu, semua dimunculkan atas nama kebebasan pers.

Judul-judul provokatif seperti Bush Babi Buta, Amerika Setan!, ataupun gaya bahasa yang kasar seperti mengibaratkan wakil rakyat yang duduk di

DPR/MPR seperti ikan lele yang berebut kotoran, kerap kali diadaptasi. Padahal cukup jelas, pers tidak boleh menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) secara tegas disebutkan, wartawan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografis, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Yang dimaksud pornografis, dalam penjelasan KEWI, adalah informasi atau gambar yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu berahi atau mengundang kontroversi publik.

Kasus yang baru beberapa bulan ini terjadi ialah tentang penayangan rekaman percakapan yang diduga berasal dari kokpit pesawat Adam Air yang jatuh di Majene, awal tahun 2007. Betapa tidak, rekaman teknis pilot dan kopilot yang semestinya digunakan kalangan sangat terbatas telah diberitakan sedemikian rupa di layar kaca tanpa menghiraukan dampaknya terhadap keluarga para penumpang dan awak pesawat. Ditambah dengan teknik editing dan kombinasi visual kepanikan di kokpit pesawat, tak pelak lagi tayangan itu semakin eyes catching, membuai penonton melupakan aspek kemanusiaan bagi keluarga korban. Apalagi, terhadap kepentingan umum yang lebih luas, seperti dampak ekonomi sanksi larangan terbang oleh Uni Eropa terhadap penerbangan nasional.

Pemberitaan yang mengumbar kesedihan berlebihan serta berita tragis, seperti kasus Adam Air, bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah sering. Dahulu ketika musibah tsunami melanda Aceh, jelas kita menyaksikan reporter dari sebuah stasiun teve berhasil "menggiring" seorang korban yang kehilangan anak gadis dan belasan anggota keluarga lainnya untuk menyanyikan lagu kesayangan sang anak. Belum puas, reporter tersebut masih membujuk sumber berita itu untuk menyanyikan satu bait lagu lagi yang tentu saja tak mampu dilanjutkan oleh sang ayah.

Di tengah kebebasan pers yang harus dijunjung tinggi, tidak ayal lagi rentetan kupasan kejadian musibah pesawat di Indonesia ini tentu saja patut diduga berkorelasi dengan dijatuhkannya berbagai travel ban oleh beberapa negara, bahkan hingga larangan terbang maskapai penerbangan nasional—tanpa kecuali—ke Benua Eropa.

Print it, and be damned! Itulah salah satu prinsip kerja jurnalis menurut teori pers libertarian (Baca: *Four Theories of the Press* karangan F. Sibert dkk.). Yang penting, beritakan dulu! Urusan lain, belakangan. Tentu, prinsip ini tidak bisa diterima oleh masyarakat yang hidup di kebanyakan "dunia ketiga", termasuk Indonesia. Wartawan yang menulis ngawur atau dengan sikap *reckless disregard*, bukan saja harus ditegur, tetapi juga dihukum.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa di balik kebebasan yang besar, pers juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya tidak saja terletak pada kualitas pemberitaannya, tetapi juga terhadap dampak dari pemberitaan tersebut. Pemberitaan yang berlebihan bisa saja membawa dampak yang luar biasa pula. Pers bukanlah pribadi *qualified privilege* sehingga bebas dari hukum karena siapapun juga dapat dituntut bila melanggar hukum.

Globalisasi informasi

Dalam era globalisasi informasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era globalisasi informasi ditandai dengan adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, yang memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.

Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional) serta meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama juga akan menandai era globalisasi informasi tersebut. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang *fashion*, literatur, dan makanan.

Globalisasi informasi dan media massa berakar pada kemajuan teknologi informasi (IT), yang telah menghadirkan komunikasi alternatif yaitu cybercom, atau jaringan internet global. Berkembangnya sistem internet global telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas ruang dan waktu, tanpa batas-batas kedaulatan negara termasuk didalamnya kedaulatan sistem hukum nasional. Sebagai akibatnya, keberadaan berbagai jenis media massa termasuk cybercom atau jaringan internet yang berakar pada kemajuan IT telah menciptakan sistem komunikasi global yang kemudian dikenal dengan *global village*.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (HAM) tentang kebebasan informasi, seakan-akan mengukuhkan globalisasi informasi, karena menurut pasal tersebut kebebasan informasi tidak lagi menghiraukan batas-batas kedaulatan dan kekuasaan suatu negara. Berdasarkan gambaran tersebut, siapapun yang mampu menguasai informasi mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan/menyajikannya dengan cepat dan menjangkau wilayah yang luas serta menjangkau khalayak yang besar, maka ia akan berkuasa, baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Kesenjangan penguasaan teknologi/ prasarana informasi serta akses terhadap informasi, telah menjadi sumber ketidakadilan di segala bidang kehidupan, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun tingkat internasional.

Permasalahannya adalah tidak adanya bangsa yang mampu menolak kemajuan IT sehingga tidak sanggup meluputkan diri dari globalisasi informasi yang membawa globalisasi sistem budaya, globalisasi sistem hukum, globalisasi sistem politik, dan globalisasi sistem ekonomi. Diperlukan adanya pemberdayaan (empowerment) individual dan institusional (pemerintah dan swasta) ditingkat lokal maupun nasional dalam penguasaan teknologi dan sarana informasi, agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen akan tetapi juga menjadi provider informasi.

Dengan penguasaan teknologi baik hardware maupun software, akan mampu menempatkan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam hal penguasaan informasi, sehingga tidak terjadi hegemoni informasi, baik melalui pemilikan (holding), jaringan (networking) atau gabungan keduanya, oleh individu, lembaga swasta, lembaga pemerintah/negara atau lembaga internasional yang lebih kuat secara ekonomi, politik, teknologi maupun profesionalismenya.

Permasalahan Seputar Kebebasan Pers Era Globalisasi Informasi

Di era informasi seperti sekarang ini, pemerintah di seluruh dunia berada di bawah tekanan untuk menghormati hak warga negara untuk berkomunikasi secara bebas. Apalagi dengan berkembangnya internet yang telah memberikan arti baru terhadap komunikasi. Internet dianggap sebagai revolusi komunikasi, bahkan mungkin sebuah revolusi informasi.

Dibanding beberapa media dan sistem komunikasi lainnya, termasuk cetak, penyiaran dan sistem pos, internet memungkinkan pengiriman dan pertukaran beragam informasi ke seluruh dunia, serta berkomunikasi secara interaktif. Peran internet sebagai media alternatif ketika media dalam negeri dihantui ketakutan pascapembredelan Tempo, Detik, dan Editor, cukup signifikan. Lewat situs Apakabar, Pijar Online, ataupun Indonews, pendapat maupun cerita-cerita unik yang tak mungkin dipublikasikan media umum di Indonesia, bisa dibaca. Situs-situs tersebut, termasuk hadirnya Tempo Interaktif, mematahkan pendapat bahwa kebebasan pers bisa dipasung dengan pencabutan SIUPP.

Dengan perkembangan revolusi melalui internet di tanah air pula, sesungguhnya persoalan kebebasan pers dalam menyuarakan kebenaran tidak mungkin bisa dibelenggu lagi. Tidak bisa tiap bit informasi yang lalu lalang dalam jaringan cyber highway disensor, apalagi dengan belum adanya aturan yang jelas mengenai lalu lintas informasi lewat network of networks ini. Karenanya, segala ketakutan akan diberangusnya kebebasan pers lewat lembaga-lembaga formal pengawas pers tidak perlu direspons berlebihan.

Yang perlu diwaspadai, seperti dikatakan Sekjen PBB Kofi Anan pada Hari Kebebasan Pers Dunia, kebebasan pers sebagai tulang punggung hak-hak asasi manusia serta mendorong keterbukaan dan pemerintahan yang baik (good governance) tetap mengundang kerawanan, baik lewat internet maupun media "konvensional". Kerawanan itu adalah adanya pelanggaran hak pribadi, moral (pornografi), dan pemanfaatan media untuk membangkitkan kebencian di kalangan rakyat.

Salah peran seperti inilah yang membuat beberapa pihak yang dirugikan mulai mengancam pers. Untuk itu, sebaiknya, proteksi kebebasan pers seperti dapat dilihat pada Undang-Undang Pers 1999, pada Pasal 28 UUD 1945 yang sudah diamandemen, serta Tap MPR XVII yang menjamin hak asasi manusia dalam arus informasi yang bebas, diimbangi dengan aturan tegas bagi pers yang kebablasan, kelewat batas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi UU Pers maupun dengan mengoptimalkan peran Dewan Pers sebagai "politisi etika" pers, yang bertanggung jawab dalam menegakkan kode etik wartawan agar kebebasan pers yang sekarang ada lebih bermartabat.

Bagi insan pers sendiri, gugatan terhadap kebebasan pers oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa perlu diwaspadai dengan lebih mawas diri dan mengawasi diri tentang keberadaan dan tanggung jawabnya terhadap publik. Publik sendiri juga perlu memahami makna kebebasan pers dengan menindaklanjutinya secara hukum jika merasa dirugikan, bukan dengan melakukan kekerasan.

.....
(*): Disampaikan dalam acara
"Seminar Nasional Jurnalistik Islam"
Takmir Masjid Kampus USM Semarang
13 September 2008

MEDIA MASSA DIANTARA PERAN DAKWAH DAN INDUSTRI

Oleh: Muhamad Nurtamymy*

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu peran dalam komunikasi adalah dipegang oleh media massa yang melakukan komunikasi massa kepada khalayak. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa media massa saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir setiap hari kita dijejali dengan berbagai macam informasi tentang kejadian-kejadian di seluruh penjuru dunia oleh yang namanya media massa. Baik informasi yang hanya berupa berita atautkah berupa pendapat-pendapat yang berbentuk analisa atau propaganda. Media massa seakan menjadi sosok yang bisa menembus apa saja. Dan tidak ada satu persoalanpun yang tidak bisa dimasuki oleh media massa baik dalam persoalan politik, sosial, budaya, lifestyle, ataupun perihal-perihal kecil lainnya yang ada di dunia. Semua persoalan itu bisa diangkat dalam media massa.

Media massa di dunia saat ini menjelma dan berperan penting dalam arus globalisasi yang saat ini melanda dunia atau dengan kata lain media massa memiliki peran yang sangat vital dan tak tergantikan dalam arus globalisasi saat ini. Tanpa media massa tidak akan berkembang isu-isu yang akan mempengaruhi opini masyarakat terkait suatu persoalan. Sehingga kita bisa melihat berbagai sektor kehidupan bisa dijamah dan dipengaruhi oleh media massa tanpa mengenal waktu.

Keadaan seperti di atas merupakan sesuatu yang wajar ketika perkembangan media massa sebagaimana yang terjadi sekarang. Media massa menjadi raja dalam menentukan arus opini yang akan dikembangkan. Ungkapan dimana media berpihak disitulah arus opini akan berkembang adalah suatu ungkapan yang nyata. Sehingga bisa kita lihat berbagai pihak sangat pandai menggunakan media massa untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Yang menjadi persoalan bagi umat islam saat ini adalah bagaimana melihat media massa, apakah media massa akan bisa memajukan dan menjadikan umat islam menuju peradaban yang benar? Dan apakah perkembangan media massa yang saat ini sangat pesat bisa berpengaruh terhadap kemajuan umat islam, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif.

Media Massa dan Industri

Media massa merupakan salah satu pihak yang menyampaikan informasi dalam masyarakat. Begitu besarnya peran media massa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat maka secara tidak langsung media massa juga membawa pesan-pesan dari pihak lain yang ingin menyampaikan informasinya kepada khalayak. Posisi media dalam peta komunikasi massa menjadi penting ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa media memiliki fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi hiburan dan fungsi mempengaruhi. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, media massa sering harus memilih antara idealisme atautkah kepentingan industri. Sebagai contoh dalam masalah periklanan, kita sering menemui bahwa

dalam menampilkan iklan lebih cenderung berorientasi pada kepentingan produsen. Masyarakat lebih terlihat sebagai sekumpulan objek yang akan dipengaruhi. Potensi iklan sebagai medium ideologis yang mampu dibaca masyarakat dan diidentifikasi sebagai bentuk kebutuhan tertentu akan komunikasi massa dengan tujuan persuasif seringkali hanya dibaca sebagai alat perayu belaka. Pada tahap tertentu, pesan dalam iklan tak lebih dari pesan dagang dengan mengabaikan bahwa masyarakat seharusnya berkembang dalam praktek komunikasinya, atau mulai bisa mengapresiasi bahwa apa yang dilihatnya di media dapat dijustifikasi sesuai nilai-nilai yang diyakini.

Adanya kesenjangan yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsinya, membuat media massa seakan menjadi ladang untuk kepentingan bisnis/industri. Atau Media massa saat ini sudah menjelma menjadi sebuah industri yang menggurita dimana memiliki berbagai macam kepentingan, apakah kepentingan bisnis semata ataukah kepentingan politik.

Kepentingan bisnis dalam perkembangan media massa bukan hanya sebuah isapan jempol belaka karena berdasarkan data, media saat ini telah menjelma sebagai salah satu raksasa industri yang menghasilkan triliunan uang. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama terutama pada media-media internasional dan akhirnya juga berpengaruh pada media-media Indonesia pada akhir-akhir ini. Perkembangan media massa sebagai industri terlihat dengan semakin terpusatnya media-media yang tergabung dalam beberapa korporasi seperti yang terjadi pada media massa di AS. Sebagai contoh selama dekade 1980-an, Amerika Serikat menyaksikan semakin terpusatnya kepemilikan media di tangan sedikit orang/perusahaan. Tidak pernah terjadi sebelumnya, korporasi-korporasi media ini memiliki kekuasaan yang sangat besar hingga dapat membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial di Amerika. Seiring dengan terjadinya revolusi teknologi penyiaran dan informasi, korporasi-korporasi media terbentuk dan menjadi besar dengan cara kepemilikan saham, penggabungan dalam joint-venture, pembentukan kerjasama, atau pendirian kartel komunikasi raksasa yang memiliki puluhan bahkan ratusan media.

Hal ini juga terjadi pada media-media di Indonesia saat ini, Sejak lama media terutama televisi telah menjadi ajang pertarungan kepentingan bisnis dan politik para penguasa. Semenjak tahun 1998, dunia televisi Indonesia semakin ramai dengan kehadiran televisi-televisi baru yang pada awalnya hanya ada stasiun televisi tunggal yaitu TVRI. Beberapa televisi bisa disebut, seperti SCTV, Global TV, TV One, TransTV, TV7, Metro TV dan sebagainya. Kehadiran berbagai televisi ini mengakibatkan persaingan antar televisipun menjadi semakin tajam. Seiring dengan perkembangan, banyak televisi yang akhirnya bergabung dengan televisi lain. Banyak pula yang melakukan konsolidasi guna membentuk konglomerasi media yang lebih besar. Sekarang ini telah terbentuk setidaknya tiga kelompok konglomerasi media. Konglomerasi media pertama adalah PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang membawahi RCTI, TPI dan Global TV. Kelompok kedua berada di bawah PT Bakrie Brothers (Group Bakrie) yang membawahi ANTV yang kini berbagi saham dengan STAR TV dan TV One. Kelompok yang ketiga adalah PT Trans Corpora yang membawahi Trans TV dan Trans-7. Ketiga televisi

swasta lainnya, yakni SCTV, Metro TV dan Indosiar, berdiri sebagai perusahaan sendiri.

PT Media Nusantara Cipta (PT MNC Terbuka) merupakan salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia. Perusahaan media ini memiliki bisnis di bidang produksi program, distribusi program, saluran televisi terrestrial, saluran program televisi, surat kabar, tabloid dan jaringan radio. Perusahaan ini boleh dikatakan sebagai perusahaan media yang terintegrasi secara raksasa.

Bentuk konglomerasi media massa ini menunjukkan dengan nyata perkembangan media massa sebagai sebuah industri. Tentunya kalau berbicara tentang industri maka yang bisa kita bayangkan adalah berlimpahnya pendapatan yang diperoleh oleh media massa. Sebagai contoh bahwa MNC dalam tahun 2007 dapat meraup pendapatan 2,308 triliun rupiah, sedangkan pada semester I tahun 2008 sudah mencapai 1,689 triliun rupiah (MNC Corporation). Bisa dilihat bahwa sebuah korporasi media bisa menghasilkan pendapatan iklan dan bisa memenuhi kebutuhan operasional media yang bersangkutan. Ini membuktikan bahwa media massa menjadi ladang industri untuk mendapatkan keuntungan.

Fakta yang menunjukkan bahwa arah media menjadi sebuah industri bukanlah hanya omong kosong, akan tetapi sudah terjadi saat ini. Munculnya korporasi-korporasi dalam media-media saat ini telah membuktikan hal itu. Korporasi media menjadi bukti nyata adanya industrialisasi media massa. Sehingga banyak kalangan yang khawatir terhadap asumsi bahwa media massa tidak lagi membawa kepentingan publik sebagaimana idealismenya akan tetapi hanya membawa kepentingan bisnis belaka. Pendapat ini memang bukan tanpa alasan, karena kalau kita lihat perkembangan media massa di Indonesia, kita bisa katakan bahwa media massa saat ini seakan kehilangan idealismenya menjadi penegak kepentingan masyarakat akan tetapi saat ini lebih banyak berpikir tentang bisnis saja. Sebagai contoh bahwa media saat ini senantiasa bisa memanfaatkan momen penting untuk mendulang rupiah seperti yang terjadi pada bulan Ramadhan, masing-masing media berlomba untuk memberikan tampilan yang bisa menarik khalayak atau lebih khususnya adalah untuk menarik iklan sebanyak-banyaknya. Karena media massa paham bahwa momen Ramadhan seperti ini akan menarik perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan. Lihatlah misalnya televisi-televisi yang ada saat ini, ketika waktu-waktu tertentu (waktu sahur) seberapa banyak iklan yang muncul dan bisa dihitung berapa uang yang keluar dalam setiap iklan itu.

Kalau kita tinjau peran media massa sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maka sudah sepatutnya media massa menjadi corong bagi masyarakat dalam membentuk opini publik yang sedang berkembang. Dengan peran dan fungsi media sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik maka peran media sangat vital dalam kehidupan. Bahkan kalau lebih jauh kita katakan bahwa media massa akan dapat merubah perilaku masyarakat, merubah cara pandang masyarakat, bahkan bisa merubah peradaban suatu masyarakat. Begitu besarnya peran media ini membuat keberadaan media saat ini menjadi sebuah dilema diantara kepentingan publik dan kepentingan bisnis perusahaan.

Mengoptimalkan Peran Media Massa dalam Syiar Dakwah

Sebagai salah satu alat vital dalam sebuah peradaban, maka media menjadi sangat penting dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam sebuah peradaban masyarakat, maka keberadaan media adalah sebagai pembentuk opini publik yang mengarahkan bahkan merubah cara pandang masyarakat terhadap suatu perubahan apakah gaya hidup atau bahkan budaya. Perubahan cara pandang akan menjadi efektif ketika perubahan itu mengarah pada perubahan yang benar. Akan tetapi menjadi tidak efektif tatkala perubahan itu mengarah pada perubahan yang salah atau cara hidup yang salah.

Memang kalau kita ibaratkan media massa bagaikan sebilah pedang yang dipegang oleh seseorang. Tatkala dipegang oleh orang yang benar dan dia bisa mengarahkan pada tujuan yang benar maka media akan membawa manfaat dalam membentuk peradaban dan kebudayaan yang benar, tetapi akan terjadi sebaliknya ketika tidak memegang kendalinya dengan baik maka akan terbawa atau bahkan tergilas oleh arus yang dibawa oleh media massa tersebut. Karena memang keberadaan media massa dalam perkembangan zaman saat ini mau tidak mau membawa beberapa dampak dalam kehidupan manusia (umat islam) apakah dampak positif ataupun negatif. Oleh karena itu keberadaan media merupakan suatu hal yang penting bagi umat islam untuk menuju pada perubahan yang benar dengan syarat fungsi dan peran media massa bisa dikendalikan dengan baik.

Diantara dampak negatif yang perlu diwaspadai oleh umat islam terhadap keberadaan media massa adalah dapat menumbuhkan keraguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya karena adanya tontonan-tontonan yang bisa mendangkalkan akidah umat islam, Pengaburan dan penggambaran buruk tentang islam untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap islam. Hal ini dapat kita lihat dari sebutan semacam terorisme, radikalisme, fundamentalisme yang di alamatkan kepada umat muslim, Pelarutan dan pencampuradukkan antara pemikiran dan budaya islam dengan pemikiran dan ideologi eropa dan barat, Westernisasi yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, gaya hidup dan apa saja yang datang dari barat, tanpa memilah-milah bagian-bagian mana saja yang positif dan yang negatif. Itu adalah sebagian dampak negatif ketika media massa tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh umat islam, yang terjadi adalah akan semakin dapat menjerumuskan umat islam dalam kehidupan yang salah.

Sedangkan dampak positif yang bisa didapatkan ketika umat islam mampu mengendalikan media massa adalah dapat mengcounter isu-isu minor yang memojokkan agama islam serta informasi-informasi yang bisa merusak akidah umat islam karena dengan media massa inilah bagaimana islam bisa menampilkan diri sebagai sebuah *dien* yang merupakan ajaran yang benar dan sesuai fitrah manusia. Media massa juga bisa menjadi fasilitator bagi umat islam dalam rangka memupuk keimanan dan ketaqwaan kaum muslimin, meningkatkan pemahaman tentang ajaran islam bagi para pemeluknya, serta menghilangkan berbagai keraguan yang ada dalam diri kaum muslimin. Itu semua bisa tercapai tatkala media massa memfungsikan diri dan berperan aktif dalam syiar dakwah islam.

Melihat kondisi di atas, keberadaan media massa dalam syiar dakwah islam adalah penting untuk menuju peradaban yang benar. Sehingga optimalisasi peran media massa sangat diperlukan guna menunjang tujuan itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang media massa sesungguhnya tidak terlalu jauh kalau kita kaitkan dengan aktivitas syiar dakwah. Karena pada hakekatnya dakwah itu adalah merupakan proses komunikasi juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh media massa. Sehingga pemahaman tentang dakwah mutlak perlu dimiliki oleh media massa yang ingin tercapai kemajuan islam. Karena sebagaimana kita tahu dakwah merupakan aktivitas wajib bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah: *Hendaknya ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah itu orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali Imran: 104). "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.* (QS. An Nahl: 125). Seruan ini menunjukkan perintah untuk menjalankan aktivitas dakwah bagi setiap muslim, dan juga sangat pentingnya peran dakwah dalam menjaga eksistensi islam karena kita ketahui bahwa hanya dengan aktivitas dakwahlah Rasulullah bisa menancapkan eksistensi islam, tentunya dengan berbagai macam cara sesuai dengan objek dakwah yang dituju.

Pemahaman tentang dakwah inilah yang harus ditancapkan dalam media massa agar fungsi dan peran media dalam dakwah islam bisa optimal. Karena dengan media massa, ajaran islam akan menjadi sebuah peradaban yang sempurna.

Adapun sebagai salah satu contoh untuk membudayakan ajaran islam maka media bisa saja memberi porsi yang lebih untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang islam, jadi pengetahuan islam di media tidak hanya bisa kita dapatkan pada bulan Ramadhan saja akan tetapi bisa kita dapatkan dalam waktu kapanpun. Jangan sampai fenomena media terjadi seperti saat ini, *blow up* opini tentang islam akan sangat tinggi ketika pada musim Ramadhan akan tetapi akan hilang bersamaan dengan berakhirnya Ramadhan. Isu-isu atau nilai keislaman ini akan bisa tertanam dengan baik dengan berbagai cara. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan media massa untuk mencapai tujuan itu. Tujuan meneruskan peradaban yang benar untuk meraih kehidupan islam yang kaffah.

Ikhtitam

Tidak dapat dipungkiri Keberadaan media sangat membantu umat islam dalam melakukan aktivitas dakwah islam. Cara ini efektif karena masyarakat yang menjadi obyek media sangat bergantung pada informasi-informasi yang disampaikan oleh media. Keberadaan media akan mengarahkan opini tentang islam di kalangan publik. Memang yang menjadi persoalan adalah bahwa pengusaha media lebih suka untuk *memblow up* informasi-informasi yang disukai oleh pasar. Sedangkan isu atau informasi tentang keagamaan sangat kurang disukai oleh pasar sehingga banyak kita ketahui bahwa acara-acara keagamaan hanya bisa dinikmati ketika waktu orang sedang tidur atau istirahat. Sehingga memang harus ada komitmen dari para insan media baik dari para jurnalis, pengusaha, atau siapapun yang berada di balik layar media massa untuk menyumbangkan atau memberikan

porsi yang lebih dalam membentuk opini publik tentang islam, bagaimana islam dan semua yang berkaitan dengan islam. Dan sesungguhnya media juga tidak perlu khawatir karena keberadaan isu-isu keislaman merupakan isu-isu yang pasti akan mendapat dukungan dari kalangan umat islam, sehingga media disamping merupakan sebuah industri tetapi harus juga bisa mengembangkan dan melestarikan ajaran islam ke seluruh dunia. Yaitu dengan mengembangkan dakwah islam dengan berbagai cara guna menuju peradaban yang hakiki yaitu peradaban yang diridhoi oleh Allah yaitu peradaban islam. Sehingga umat islam menjadi umat yang terbaik, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Ali mron ayat 110: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Wallahu a'lamu bisshawab.*

* Penulis adalah Pengamat Peradaban Islam ISTAC Jakarta. (Islamic Thought and Civilization)

** Makalah disampaikan dalam diskusi panel Pers dan Media Masa, dalam acara Seminar dan pelatihan dasar jurnalistik dengan tema MEWUJUDKAN PENA PEDULI UMAT di Gedung Auditorium Universitas Semarang, tanggal 13 September 2008 yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Universitas Semarang (USM).